

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaca Pengetasan Kemiskinan di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur

Nur Sawitri^{1*}, Widya Rahmat²

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Abstrak: Salah satu permasalahan utama adalah kemiskinan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah menjelaskan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia terkadang perlu diatasi dengan program khusus karena pengentasan kemiskinan secara keseluruhan dianggap sebagai salah satu tujuan peningkatan kemiskinan Meningkatkan kebutuhan sosial, pendidikan dan kesehatan keluarga. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan Program Keluarga Harapan saat ini berfungsi dalam operasi bantuan di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data Observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi menunjukkan adanya kendala di wilayah ini. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya Keterlambatan implementasi program Keluarga Harapan, yaitu penyaluran bantuan tunai melalui ATM, dan hambatan akses antar desa menjadi kendala dalam hal ini. Hal ini penting agar seluruh penerima manfaat dapat lebih memahami tujuan, mekanisme dan manfaat PKH. Untuk mencegah program PKH hanya memberikan dukungan sementara, disarankan untuk memasukkan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi penerima manfaat hal ini akan membantu penerima PKH meningkatkan kemandirian finansial dan mencegah mereka bergantung pada bantuan jangka panjang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengetasan Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.200>

*Correspondence: Nur Sawitri

Email: sawitriurnurr19@gmail.com

Received: 24-01-2025

Accepted: 22-02-2025

Published: 23-03-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: One of the main problems is poverty in many developing countries, including Indonesia. The government explains that the problem of poverty in Indonesia sometimes needs to be addressed with special programs because alleviating poverty as a whole is considered as one of the goals of increasing poverty. Increasing the social, educational and health needs of families. The aim is to examine how the Family Hope Program policy is currently functioning in aid operations in Pantai Harapan Village, Cempaga Hulu District, East Kotawaringin Regency. In this research, qualitative methods were used with data collection techniques, direct observation, in-depth interviews, and documentation showing that there were obstacles in the area. This area. The results of the research show that there are delays in implementing the Family Hope program, namely the distribution of cash assistance via ATMs, and barriers to access between villages are obstacles in this regard. This is important so that all beneficiaries can better understand the objectives, mechanisms and benefits of PKH. For prevent the PKH program from only providing temporary support, it is recommended to include skills and entrepreneurship training programs for beneficiaries. This will help PKH recipients increase financial independence and prevent them from being dependent on long-term assistance.

Keywords : Policy Implementation, Poverty Alleviation, Family Hope Program

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi permasalahan yang banyak dihadapi Negara berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan ini merupakan tantangan bagi pemerintah yang harus dihadapi dari masa ke masa. Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, diperlukan program khusus seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang intergritas pengentasan kemiskinan. Pemerintah menetapkan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. hidup mereka melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Pemerintah memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan yang ada. Di Indonesia, berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan social (Novita 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan implementasi dari Program Keluarga Harapan (FHP) diperkenalkan pada tahun 2007 dengan tujuan memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu dan berkontribusi terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 10 Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasiona mengatur tentang penyelenggaraan PKH di Indonesia. Sedangkan Sekretariat Kabinet. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Masyarakat Miskin merupakan undang-undang dasar pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan memberikan pedoman teknis pelaksanaan PKH, meliputi kriteria manfaat, besaran bantuan, dan tata cara administrasi. Distribusi dalam peraturan ini untuk menjamin terselenggaranya PKH (Rasyida 2019).

Tujuan PKH yakni bantuan sosial wajib diberikan pada membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan Kesehatan dan kehidupan sosial,meningkatkan taraf hidupan keluarga miskin melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Rumah tangga miskin dimasukan dalam data kesejahtraan sosial (DTKS), sektor kesejahteraan, seperti anak sekolah, Ibu hamil, lansia atau penyandang disabilitas. Jenis bantuan berupa keuangan diberikan dengan syarat penerimanya memenuhi persyaratan tertentu, seperti memastikan anak-anaknya

bersekolah dan anggota keluarga mempunyai akses terhadap layanan kesehatan. Program ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, bantuan disalurkan melalui bank-bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah Pusat dan daerah bertanggung jawab melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PKH Untuk memastikan afektivitas dan kesesuaian tujuan Program (Kamalussin 2021).

Implementasi secara kamus besar Bahasa Indonesia (Indonesia et al. 2000) pelaksanaan rencana yang dicencanakan dapat diartikan sebagai Penggunaan sesuatu yang dirancang dengan cermat, agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas, serangkaian tahapan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk menciptakan keadaan statis akibat keadaan yang ditandai dengan berbagai masalah (Wahyudi 2019). Pada dasarnya tujuan kebijakan dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan. Model pelaksanaan sistem Van Mater dan Van Horn (Tajhan, 2006), 2) dikutip oleh (Sutikno et al. 2023) terdapat variabel pendorong seperti Sumber daya, karakteristik peran pendamping dan keadaan sosial ekonomi, sedangkan unsur penghambat terdapat pada tidak sinkronnya informasi kependudukan dan wilayah penerima manfaat PKH yang sulit dijangkau, 3) kelayakan Program Kepercayaan Keluarga (PKH) dinilai dengan menggunakan 4 pedoman dari (Budiani, 2007:53) yaitu ketepatan tujuan, sosialisasi program, sasaran dan pengawasan program. Yang mana dari keempat penanda tersebut bisa dikatakan belum terpenuhi, sehingga dinilai PKH belum benar-benar siap memusnahkan kemiskinan 100 persen di Kabupaten bangkalan (Albar and Syamsudin 2024). Penting untuk memahami bagaimana program ini diterapkan dalam praktiknya dan dampaknya terhadap keluarga penerima manfaat. Selain itu, perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat seiring berjalannya waktu juga harus dipertimbangkan. (Kristian 2022).

Ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

- a. Komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan, di mana pelaksana harus memahami tujuan kebijakan dan menyampaikannya kepada kelompok sasaran untuk menghindari hambatan dalam implementasi.
- b. Ketersediaan sumber daya sangat penting dalam keberlangsungan implementasi kebijakan. Sekalipun komunikasi dilakukan dengan baik, implementasi tidak akan berhasil tanpa dukungan finansial yang memadai. Sumber daya tersebut dapat berasal dari sumber daya manusia, misalnya kapasitas pelaksanaan dan sumber daya keuangan
- c. Disposisi artinya sifat dan sifat yang dimiliki individu, seperti dedikasi, kejujuran dan watak demokratis (Adedini 2022). Apabila aparat penegak hukum mempunyai

itikat baik, maka mereka akan mampu menegakan hokum sesuai keingan pengambil kebijakan,akibatnya proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

- d. Struktur birokrasi mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan.Aspek Struktur organisasi meliputi standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi.Struktur organisaasi yang ada sejak lama akan menimbulkan kekhilafan dan menimbulkan birokrasi,yaitu struktur organisasi yang berbelit belit sehingga menyulitkan pekerjaa.Dalam (Sos 2020), mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan adalah Proses menjadikan sebuah kebijakan efektif dalam mencapai tujuan yng ditetapkan,tanpa melebihi atau kurang dari itu.Dua pilihan yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan turunan dari formulasi yang sudah ada. Kebijakan publik yang diatur dengan undang-undang atau undang-undang daerah merupakan jenis kebijakan yang memerlukan pedoman umum yang jelas yang dikenal dengan aturan yang dapat dilaksanakan, antara lain keputusan presiden, arahan presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas dan lain-lain.Adapun makna menurut (Mahin 2022) Implementasi merunjuk pada pemahaman tentang apa yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.Fokus Utama dari implementasi kebiksanaan adalah kejadian-kejadian yang terjadi setelah pedoman kebijaksanaan Negara disahkan, termasuk upaya untuk mengelola dan membawa dampak nyata pada masyarakat atau kejadian yang ada (Namuhani 2024).

Sebagian besar di Indonesia yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan salah satunya Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Cempaga Hulu Desa Pantai Harapan.Deso Pantai Harapan yang terletak di Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Timur Kabupaten Kotawaringin Timur ,termasuk desa terpencil karena termasuk dalam kawasan perkebunan kelapa sawit dan masih dikelilingi hutanakses menuju Desa Pantai Harapan tergolong sulit oleh karena itu Desa Pantai Harapan menghadapi tantangan sosial maupun kemiskinan .Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kondisi geografis dan demografis yang unik sehingga memerlukan perencanaan yang strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan Latar belakang tersebut ,Program Keluarga Harapan(PKH) diharapkan dapat berperan penting dakan tariff hidup keluarga miskin di desa,rata-rata pendapat penduduk di desa tersebut tidak menetap (Grady 2022).

Impelentasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dilihat dari pelaksanaan kebijakan PKH yang sudah dijalankan,sebagaimana tujuan untuk mengatasi kemiskinan

di desa tersebut, dalam melaksanakan program ini sering kali pemerintah tidak memperhatikan Sumber daya Manusianya oleh karena program ini tidak bisa berjalan dengan efektif. implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program yang membuat ketidaktepatan sasaran bantuan masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin.

Tujuan Penelitian ini mengetahui Upaya pemerintah Daerah maupun pemerintah daerah dalam Pengentasan Kemiskinan yang ada di desa pantai harapan khususnya permasalahan masyarakat miskin maka pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di desa Pantai Harapan melalui kegiatan kesejahteraan sosial. Salah satu program khusus pemerintah untuk mempercepat pengentasan masalah kemiskinan adalah program keluarga harapan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif untuk memahami fenomena yang ada, pendekatan ini berfokus pada pengalaman peneliti dan fakta di lapangan. Menurut Creswell (2014) dikutip oleh (Jailani 2023), penelitian kualitatif ialah suatu pendekatan untuk melihat dan memahami bagaimana individu atau kelompok menghubungkan masalah sosial atau kemanusiaan. Pertanyaan yang muncul, pengumpulan data di lingkungan partisipan, dan penataan analisis data dari tema khusus ke tema umum adalah semua bagian dari proses penelitian ini, data kemudian dipahami oleh peneliti. (Fadli 2021) menekankan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada perolehan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dengan menggunakan metode yang fleksibel dan adaptif tergantung pada konteks penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Subjek penelitian melibatkan penerima manfaat, petugas program pemerintah desa, dan masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat PKH. Teknik pengumpulan data terdapat beberapa cara, yaitu: 1. wawancara secara mendalam dilakukan terhadap para penerima manfaat, petugas pelaksana program, pemerintah desa, dan masyarakat miskin non-penerima bantuan PKH. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi lengkap dan detail tentang implementasi PKH sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Pantai Harapan 2, Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lapangan untuk memahami cara pelaksanaan program dan dampaknya terhadap masyarakat. 3. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan dari dokumen resmi, seperti laporan pelaksanaan PKH, data statistik tentang kemiskinan, dan kebijakan yang relevan (Rossel 2019).

Sebagai bagian dari proses analisis data, Analisis data kualitatif digunakan teknik tematik digunakan untuk menemukan tema-tema utama terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan Desa Pantai Harapan untuk memastikan keabsahan data, trigulasi data yang dilakukan dengan memeriksa data dari observasi, dokumentasi dan hasil wawancara.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan cara desa pantai harapan kecamatan cempaga hulu kabupaten kotawaringin timur menerapkan program keluarga harapan (PKH) untuk memerangi kemiskinan. Untuk melakukan analisis data dari penelitian lapangan yang digunakan. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dianalisis dengan memperhatikan beberapa aspek penting (Wulandari 2020). Mata kalteng (2023, Maret 23). Delapan ribu lebih masyarakat Kotim terima bantuan PKH, dari data di atas terdapat 8.711 KPM di kecamatan cempaga hulu ada 416 KPM diantaranya merupakan penerima PKH, dengan jumlah tersebut, di Desa Pantai Harapan sendiri memiliki jumlah sebanyak 33 keluarga penerima manfaat PKH. Kriteria penerima bantuan PKH adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang membutuhkan bantuan sosial-ekonomi, memiliki e-KTP, bukan anggota ASN, Polri, atau TNI, belum menerima bantuan lain, dan Terdatardalam DTKS kementrian Sosial RI. Keluarga berhak menerima bantuan PKH termasuk anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah, anak SD, S MP, atau SMA, anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, orang dewasa berusia 70 tahun ke atas dan penyandaang disabilitas berat.

- *Efektivitas Impelemntasi Kebijakan Program Keluarga Harapan*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dan observasi lapangan PKH di Desa Pantai Harapan terbukti Memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM). Sebagian besar KPM mengakui bahwa bantuan yang diberikan telah membantu meringankan beban keuangan mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Menurut kpm dalam wawancara, menyatakan “sebelum menerima bantuan dari PKH, sulit untuk membayar biaya sekolah anak saya. Berkat bantuan ini, kami sekarang bisa membeli seragam dan buku pelajaran dan anak-anak tidak perlu lagi berhenti sekolah” Hasil tersebut menunjukkan bahwa PKH berperan dalam mendukung upaya pengetasan kemiskinan, khususnya di bidang pendidikan.

- *Peran pendamping PKH dalam Pelaksanaan Program*

Peran pendamping PKH di Desa Pantai Harapan sangat strategis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Pendamping ini hanya berperan sebagai penghubung antara penerima manfaat dengan pemerintah, namun juga sebagai motivator bagi keluarga penerima manfaat. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar KPM merasa didukung dengan keberadaan pendamping, terutama dalam hal pemahaman teknis pelaporan dan penggunaan dana bantuan. Salah satu kpm menyatakan "Pendampingan yang dilakukan pendamping sudah cukup sangat baik, pendamping sering melakukan sosialisasi terhadap pelaporan dan juga pentingnya penggunaan dana yang tepat, tidak hanya itu pendamping rutin melakukan pengecekan ke rumah rumah kami KPM untuk mengecek keadaan kami" hal ini menunjukkan bahwa kehadiran pendamping berperan penting tidak hanya dalam penyampaian informasi, namun juga dalam mendampingi dan mengedukasi keluarga penerima manfaat.

- *Peran pemerintah Desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan*

Peran Pemerintah desa dalam pelaksanaan program ini sangat penting dimana pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan seperti menyediakan fasilitas kesehatan, penyaluran bantuan, dan juga pemberitahuan terkait masyarakat penerima PKH, hasil wawancara dengan Kepala Desa Pantai Harapan menyatakan bahwa "Pemerintah desa hanya membantu mendata dan memfasilitasi Pelaksanaan PKH terkait siapa yang menerima PKH itu ketentuan pemerintah Daerah. Masyarakat desa terbantu dengan adanya program PKH akan tetapi belum memenuhi kebutuhan secara maksimal dikarenakan bantuan yang disalurkan belum tergolong cukup hanya bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan misalnya sekolah anak, kebutuhan yang lain belum tentu terpenuhi. Kadang kala masyarakat menggunakan bantuan PKH sebagai pemenuhan keperluan lain bukan dari pemenuhan kebutuhan pemerintah desa sering melakukan sosialisasi bagaimana pemanfaatan bantuan PKH maupun bantuan lainnya sesuai dengan syarat yang berlaku" hal ini menunjukkan bahwa peran yang dimainkan pemerintah desa sangat penting dalam pelaksanaannya bantuan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya penggunaan dana bantuan dengan tepat agar memenuhi kebutuhan sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku.

- *Hambatan dalam pelaksanaan Program*

Meskipun program ini memiliki banyak dampak positif, peneliti ini menemukan beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Salah satu kendala adalah saat penyaluran bantuan berupa tunai dilakukan penarikan dana di atm sering kali terkendala keterlambatan penerima bantuan dan juga ATM KPM bermasalah

sering kali menghambat pelaksanaan PKH. Menurut Narasumber Penerima manfaat, menjelaskan “Kadang kala terjadi keterlambatan dalam penyaluran sehingga kami kesusahan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membuat kami sabar menunggu informasi penyaluran dana bantuan.ada beberapa sodara kami sesama penerima PKH yang ATMnya bermasalah harus mengurus terlebih dahulu ada yang kata sandi terbelokir, tidak masuk dan masalah lainnya sering kali yang atmnya bermasalah harus mengurusnya terlebih dahulu di BANK daerah lain karena di desa ini BANK tidak ada. Dalam memenuhi kebutuhan kami apabila adanya keterlambatan penyaluran kami melakukan pinjaman sementara untuk memenuhi kebutuhan kami” Faktor ini mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada bantuan PKH.

Hambatan lainya yang dirasakan Penerima bantuan mapun Pendamping dalam pelaksanaan PKH ,menurut hasil wawancara dengan Pendamping mengenai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PKH menjelaskan “kendala yang paling banyak yang dialami hambatan penyaluran bantuan melalui ATM, selain itu terdapat beberapa masyarakat yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan merasa ingin dapat bantuan PKH sedangkan masyarakat tersebut digolongkan sebagai masyarakat yang mampu dan tidak layak mendapatkan bansos. Kendala lainya yang kami sebagai pendamping alami yakni akses antar desa yang jaraknya lumayan jauh jikalo ingin berkoordinasi ,selain itu area blank spot jika hendak melakukan pendataan online” faktor ini juga mempengaruhi pelaksanaan program PKH di desa Pantai Harapan



Figure 1. Pendampingan dalam Penyaluran dana Bantuan Apabila ada kendala

- *Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah daerah maupun pemerintah desa*

Melakukan pendataan secara merata bagi masyarakat yang tidak mampu atau dikategorikan masyarakat sangat miskin sekali RSTM .Sosialisasi rutin dilaksanakan Pendamping seperti sosialisasi penggunaan kartu keluarga sejahtera dan buku tabungan, adapun sosialisasi penggunaan dana bantuan agar KPM bijak dalam menggunakan dana bantuan sesuai dengan kebutuhan KPM itu sendiri, setiap bulan masyarakat desa menjalankan program kesehatan imunisasi baik itu untuk ibu hamil, balita, dan juga lansia secara rutin, dan yang terakhir pendampingan dalam penyaluran bantuan tunai di ATM oleh pendamping



Figure 2. Sosialisasi yang dilakukan Pendamping dalam Penggunaan Buku Tabungan dan Juga kendala yang sering dihadapi KPM

- *Dampak Program PKH bagi perekonomian masyarakat di desa Pantai Harapan*

Mayoritas penerima manfaat di Desa Pantai Harapan telah meningkatkan pendapatan keluarga. Walaupun bantuan ini bersifat sementara, penerima dapat mengurangi pengeluaran mereka. Dengan begitu, pendapatan mereka dapat dialokasikan untuk keperluan produktif, seperti memulai usaha kecil-kecilan di sektor pertanian dan peternakan. Di Desa Pantai Harapan, PKH mendorong keluarga agar menyekolahkan anak-anak mereka. Bantuan ini berperan penting dalam menurunkan angka putus sekolah, terutama pada tingkat SD dan SMP, karena dana yang diterima sering dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan sekolah dan seragam. Penerima PKH di Desa Pantai Harapan menunjukkan peningkatan dalam akses ke fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas dan Posyandu. Hal ini terlihat dari kunjungan rutin ibu hamil dan

balita untuk pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan anak. Di desa tersebut, penerima PKH sering aktif dalam kegiatan sosial dan masyarakat. Ini disebabkan oleh peningkatan kepercayaan diri setelah ekonomi mereka sedikit membaik.

Secara keseluruhan, penerima PKH di Desa Pantai Harapan merasakan peningkatan kualitas hidup, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan stabilitas ekonomi keluarga. Berdasarkan wawancara dengan KPM yang ke dua yaitu "kami merasa terbantu dengan adanya program PKH ini, kami bisa membayar sekolah anak kami dan juga memenuhi kebutuhan kami tapi bantuan yang disalurkan masih belum cukup untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan dapur yang lain sebagainya" Dampak implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Pantai Harapan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Meskipun pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan masih bersifat singkat, pengelolaan dana PKH yang cerdas oleh sebagian penerima menunjukkan potensi untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Program Keluarga Harapan di Desa Pantai Harapan telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Peran penting pendamping PKH meliputi memastikan kelancaran program dan memberikan motivasi kepada KPM. Peran pemerintah desa juga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan PKH dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Meskipun program ini memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa hambatan yang menghambat efektivitas implementasi PKH, seperti keterlambatan penyaluran bantuan tunai melalui ATM dan masalah teknis terkait ATM. Penerima manfaat dan pendamping juga mengalami kendala terkait akses antar desa dan penyaluran bantuan. Namun, dampak Program PKH bagi perekonomian di Desa Pantai Harapan sangat positif. Penerima manfaat dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan mengalokasikan dana untuk keperluan produktif. Bantuan juga mendorong peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial. Secara keseluruhan, implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Pantai Harapan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaan program, potensi untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan tetap ada. Penerima manfaat merasakan peningkatan kualitas hidup, namun perlu perhatian lebih dalam pemenuhan kebutuhan lainnya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Simpulan

PKH memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan bantuan sosial. Melibatkan penerima manfaat, petugas program, pemerintah desa, dan masyarakat miskin yang tidak menerima manfaat dari program ini. Wawancara mendalam dilakukan dengan para penerima bantuan, petugas pelaksana program dan pemerintah desa. Tujuan dari wawancara mendalam ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana kebijakan program keluarga harapan diterapkan untuk meakhiri kemiskinan di desa.

Hasil Penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pantai Harapan terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan KPM, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Meskipun program ini memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa hambatan yang menghambat efektivitas implementasi PKH, seperti keterlambatan penyaluran bantuan tunai melalui ATM dan masalah teknis terkait ATM. Bantuan juga mendorong peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial. Secara keseluruhan, implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Pantai Harapan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Pemerintah daerah dan desa melakukan pendataan untuk masyarakat tidak mampu atau sangat miskin (RSTM).

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah dan petugas PKH di Desa Pantai Harapan meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi program. Hal ini penting agar semua penerima manfaat memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat PKH secara lebih menyeluruh. Sosialisasi dapat dilakukan secara rutin melalui pertemuan kelompok penerima manfaat, media lokal, dan pendampingan personal oleh pendamping sosial. Untuk mencegah program PKH hanya memberikan bantuan sementara, disarankan untuk menyertakan program pelatihan keterampilan dan wirausaha bagi penerima manfaat. Hal ini akan membantu penerima PKH meningkatkan kemandirian ekonominya dan tidak terus bergantung pada bantuan jangka panjang. Pendampingan ini bisa melibatkan kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja atau lembaga keuangan mikro untuk memberikan akses modal usaha.

Daftar Pustaka

Adedini, S A. 2022. "Exploring Barriers and Facilitators to Integrated Policy Formulation and Implementation of Family Planning and Urban Development Programmes in Nigeria." *Health Research Policy and Systems* 20(1). doi:10.1186/s12961-022-00924-0.

- Albar, Refalgi, and Syamsudin Syamsudin. 2024. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan." *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik* 8(1): 51–64.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21(1): 33–54.
- Grady, A. 2022. "Barriers and Facilitators to the Implementation of Healthy Eating, Physical Activity and Obesity Prevention Policies, Practices or Programs in Family Day Care: A Mixed Method Systematic Review." *Preventive Medicine* 157. doi:10.1016/j.ypmed.2022.107011.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa, Megumi Uchino, UNFPA Indonesia, L F Indonesia, Jackie Viemilawati, Ni Nyoman Anna, I INDONESIA, et al. 2000. "Tim Penyusun."
- Jailani, M Syahrani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1(2): 1–9.
- Kamalussin, O A La. 2021. "Inhibiting Factors (Internal & External) Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bone Regency." *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*: 6269–75. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85114266433&origin=inward>.
- Kristian, Indra. 2022. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 9(1): 23–37.
- Mata kalteng.(2023, Maret 23).Delapan ribu lebih masyarakat Kotim terima bantuan PKH.Diakses pada 11 Oktober 2024, dari <https://www.matakalteng.com/daerah/kotawaringin-timur/2023/03/23/delapan-ribu-lebihmasyarakat-kotim-terima-bantuan-pkh>
- Mahin, Mikael. 2022. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM." *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 20(1).
- Namuhani, N. 2024. "Equity in Family Planning Policies and Programs in Uganda: Conceptualization, Dimensions and Implementation Constraints." *International Journal for Equity in Health* 23(1). doi:10.1186/s12939-024-02143-1.
- Novita, R. 2021. "The Implementation of Probabilistic Neural Network Algorithm for Classification of Family Hope Program in Pekanbaru City." *Journal of Physics: Conference Series* 1783(1). doi:10.1088/1742-6596/1783/1/012018.

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai. Diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175301/Perpres%20No%2063%20Tahun%202017.pdf>
- Rasyida, A U. 2019. "Qualitative Study of Family Planning (Kb) Village Program's Implementation in East Java Province-Indonesia." *Indian Journal of Public Health Research and Development* 10(9): 608–12. doi:10.5958/0976-5506.2019.02498.7.
- Rossel, C. 2019. "How Could Conditional Cash Transfer Programme Conditionalities Reinforce Vulnerability? Non-Compliers and Policy Implementation Gaps in Uruguay's Family Allowances." *Development Policy Review* 37(1): 3–18. doi:10.1111/dpr.12327.
- Sos, Joko Pramono S. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Sutikno, Chamid, Indah Ayu Permana Pribadi, Zaula Rizki Atika, and Ariesta Amanda. 2023. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas." *Musamus Journal of Public Administration* 5(2): 267–80.
- Wahyudi, A. 2019. "Implementation Evaluation of the Family Hope Program in Support of Basic Education." *Opcion* 35: 1028–43. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85071391911&origin=inward>.
- Wulandari, D A R. 2020. "Implementation of Gamification Concept in the Health Complaint Service System to Improve the Public Health Services System of Banyuwangi for Supporting the Health Indonesia Program through a Family Approach." *Annals of Tropical Medicine and Public Health* 23(8): 1219–27. doi:10.36295/ASRO.2020.2385.